

**PENERAPAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
HAKIM DAN SISTEM PENGAWASANNYA DI
PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Jurusan Peradilan Agama
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh

HASANUDDIN HASIM

NIM. 10100109017

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar Agustus 2013
Penyusun

Hasanuddin Hasim
NIM. 10100109017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **HASANUDDIN HASIM**, NIM: 10100109017, mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Penerapan kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Sistem Pengawasannya di Pengadilan Agama Pangkajene", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, Agustus 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abd. Halim Talli, S. Ag., M. Ag
NIP. 19711020 199703 1 002

Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag
NIP. 19681027 199403 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Sistem Pengawasannya di Pengadilan Agama Pangkajene**” yang disusun oleh **Hasanuddin Hasim**, NIM. 10 100 109 017, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 M, bertepatan dengan 23 Syawal 1434 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 17 September 2013 M
12 Dzulkaidah 1434 H

DEWAN PENGUJI

SK No. Tahun 2013

Ketua : Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A. (.....)
Sekretaris : Dr. H. Kasjim Salenda, M.Th.I. (.....)
Munaqisy I : Drs. H. Lomba Sultan, M.A. (.....)
Munaqisy II : Drs. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag. (.....)
Pembimbing I : Dr. H. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag. (.....)
Pembimbing II : Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag. (.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.

NIP. 19570414 198603 1 003

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين, سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah swt., Allah Maha pengasih, Maha pemurah dan Maha penyayang, yang tak henti-hentinya memberikan pertolongan dan telah mengajarkan dan memberikan begitu banyak ilmu kepada hambaNya, sehingga penulis masih dapat beraktifitas utamanya dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada baginda junjungan Nabi Besar Muhammad saw., yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya tentang indahnya hidup dibawah naungan panji-panji Islam, dan begitupula kepada keluarga, sahabat beliau dan kepada siapa saja yang senantiasa istiqamah di atas manhajNya hingga akhir hayat.

Dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, penulis telah berusaha secara maksimal dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Sistem Pengawasannya di Pengadilan Agama Pangkajene**".

Penulis menyadari, bahwa banyak pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan ini, oleh karena itu, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun meteril yang

mampu membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga hambatan-hambatan dapat teratasi dengan baik, antara lain:

1. Yang tercinta kedua orang tua penulis Ayahanda Hasim, Ibunda Hafawati R, S.Ag, dengan susah dan jerih payahnya mengasuh dan mendidik, serta semua kalangan keluarga yang telah memberikan bantuan moril dan materil serta doa restu sejak awal melaksanakan studi sampai selesai.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., MS dan Segenap Pembantu Rektor yang dengan kebijaksanaannya, sehingga penulis merasa diri sebagai warga kampus insani akademisi.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. Ali Parman, MA serta segenap jajarannya yang telah memberikan kemudahan serta fasilitas dalam hal penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda Dr. H. Abdul Halim Talli, M. Ag selaku ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar dan Juga selaku pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis sehingga karya tulis ini dapat terwujud.
5. Ibunda A. Intan Cahyani, M. Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Peradilan Agama yang juga telah meluangkan waktunya memberikan segala motivasi dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama keberadaan penulis di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Ayahanda Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag., selaku pembimbing II penulis, yang juga telah meluangkan waktunya kepada penulis sehingga karya tulis ini dapat terwujud.

7. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga penulis tidak menemukan kesulitan dalam penyusunan karya ilmiah ini.
8. Staf Peradilan Agama, kak Sry, yang banyak membantu memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
9. Segenap instansi pemerintah yang telah membantu dan memudahkan proses penelitian dalam menggarap karya ilmiah ini.
10. Kepada Pengadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep serta segenap pegawainya yang telah memberikan masukan-masukan selama penelitian.
11. Kepada saudara saya, Kakanda Nasruddin Rasyid, S.Hi dan Muh. Rusdi Rasyid yang telah memberikan motivasi berupa moril dan meteril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Dan yang tak pernah terlupakan, saudara-saudara dan rekan-rekan/Keluarga Besar Asrama IV IPPM Pangkep, Keluarga Besar IPPM Pangkep Koordinator UIN Alauddin Makassar, teman-teman di BEM-F Syariah dan Hukum, teman-teman di HMJ Peradilan Agama dan teman-teman seangkatan PA 09, juga terkhusus kepada saudari Fauzia M. Natsir yang terus memberi semangat dan dorongan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih atas segala bantuanya kepada semua pihak yang penulis tidak sempat sebutkan namanya satu persatu.

Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan di dalamnya, baik yang berkaitan dengan materi maupun metodologi

penulisan. Karena itu, sumbangan pemikiran yang konstruktif sangatlah diharapkan dalam rangka penyempurnaan karya ilmiah.

Akhirnya kepada Allah jualah kita kembali, semoga sang Khalik memberikan kekuatan dan keterbatasan atas segala yang diperbuat, serta segala kerendahan hati penulis, diharapkan agar karya ini dapat berguna bagi yang membutuhkannya terutama bagi penuli sendiri, Amin.

*Wallahu yahdi ilal khaeri wal amanah
Assalamu alaikum wr. wb.*

Makassar Agustus 2013
Penyusun

Hasanuddin Hasim
NIM. 10100109017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian	7
D. Kajian pustaka	8
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM	
A. Pengertian Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	11
B. Pembahasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.....	22
C. Perumusan dan Penetapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman pelaksanaan tugas sebagai hakim	25
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian.....	28
B. Populasi dan Sampel	35
C. Metodologi penelitian	37
D. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	43
 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai Pedoman Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene.	45

B. Problematika Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai Pedoman Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene	49
C. Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkajene	51
D. Sistem Pengawasan terhadap Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada Pengadilan Agama Pangkajene	57
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Implikasi dan Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Nama : **HASANUDDIN HASIM**
NIM : 10100109017
Judul Skripsi : **Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan sistem Pengawasannya di Pengadilan Agama Pangkajene**

Skripsi ini membahas masalah “*Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan sistem Pengawasannya di Pengadilan Agama Pangkajene*” yang bertujuan untuk mengetahui penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim itu sendiri. Disamping itu juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan terhadap penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim di kabupaten pangkep.

Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Pedoman Tingkah laku (*Code of Conduct*) Hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi Hakim yang menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.

Untuk memperoleh data tentang masalah ini dilakukan dengan cara observasi, interview dan angket. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Selanjutnya dikelola data menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan yuridis, sosio historis dan empiris.

Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa dalam menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim di Pengadilan Agama Pangkajene, masing-masing hakim dihadapkan pada problematika yang berbeda-beda. Sistem pengawasan terhadap penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim pada setiap pengadilan agama diserahkan kepada kewenangan ketua pengadilan agama yang menjadi pengawas internal atas setiap tingkah laku yang dijalankan oleh hakim, begitu pula yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkajene.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hal itu merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara.

Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang. Sebagaimana diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi. Sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan

kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Kode etik itu penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi kelompok profesi (demikian pula para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan.

Setiap bentuk profesi mempunyai problem pembinaan sendiri. Boleh jadi ilham tentang pengalaman di masa yang lalu, kode profesi yang dijalani akan membentuk situasi tertentu. Luhur tidaknya sebuah profesi tergantung pada situasi saling percaya yang terkandung kehidupan sosial.²

Dalam menjalankan tugas seorang hakim haruslah sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sebagaimana telah di sumpah menjadi hakim yang harus menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut.

Agar independensi seorang hakim selalu terjaga, maka seorang hakim dituntut untuk secara intensif memerhatikan kejujuran dan integritasnya. Sebab hal ini adalah fondasi keadilan yang harus selalu ditegakkan. Orang-orang yang berperkara terkadang berusaha merusak integritas hakim yang menangani perkara mereka dengan berbagai cara.

Untuk mencapai tujuan itu orang-orang tersebut akan mencari cara agar mereka mendapat kesempatan untuk menjalin hubungan dengan hakim. Orang-

¹Lihat Pembukaan Keputusan Bersama MA & KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

²E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum* (Cet I; Jogjakarta : Kanisius, 1995), h. 35.

orang tersebut merusak integritas hakim dengan mendapatkan kemurahan hati yang tidak semestinya dalam persidangan, dan mengeksploitasi hubungan mereka dengan hakim.

Untuk menghindari hal yang sering dialami oleh seorang hakim tersebut, maka mereka harus melakukan usaha terbaik untuk menolak berbicara dengan orang-orang seperti itu, supaya integritas mereka tetap terlindungi. Jika integritas seorang hakim atau menjadi perbincangan, akan sulit baginya untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik karena tidak akan ada lagi yang percaya terhadap kejujurannya.³

Seorang hakim peradilan agama haruslah mempunyai kadar ilmu pengetahuan yang cukup, tidak hanya mengetahui ilmu hukum Islam saja tetapi juga harus mengetahui hukum umum dan perangkat hukum yang berlaku serta mampu mengimbangi perkembangan hukum itu sendiri dalam arus globalisasi sekarang ini.

Hakim haruslah mempunyai wawasan yang luas terhadap ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan secara akademisi untuk mengantisipasi berbagai problem hukum dalam melaksanakan tugasnya.⁴

Hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar

³Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (cet.II; Jakarta: Kencana, 2010), h.136.

⁴*Ibid.*, h.192.

telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga putusannya nanti dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.

Mengenai peranan hakim dalam menegakkan kepastian hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari kemenangan, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan.⁵

Hal-hal tersebut pada saat ini menjadi problem besar di Negara ini. Hukum bisa dipergunakan dengan formalitas-formalitas belaka dan dilepaskan dari ruh etikanya. Pada para penegak hukum bukan lagi mencari kebenaran melainkan bagaimana mencapai kemenangan *riil* sesuai dengan yang diinginkan dirinya maupun klien yang memesannya.

Penyelesaian kasus-kasus hukum di pengadilan pun tidak lagi mengandalkan kekuatan argumen yang murni hukum melainkan diselesaikan melalui lobi-lobi politik dan negosiasi tentang cara penyelesaian atau materi putusan yang dapat dinilai dengan harga uang tertentu.⁶

Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain pengawasan dimaksud, untuk menjaga dan menegakkan

⁵Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif* (Jakarta: Buku Kompas, 2007), h. 275.

⁶Lihat Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam kontroversi Isu* (Cet. II; Jogjakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 90.

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh komisi yudisial.

Hakim harus memiliki integritas atas kepribadian *tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia*, serta berpengalaman di bidang hukum. Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. dalam melakukan pengawasan hakim, Komisis Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. dalam hal ini terdapat perbedaan antara hasil pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pelaksanaan tugas tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara. Ketentuan mengenai pengawasan eksternal hakim diatur dalam undang-undang.

Dalam Melaksanakan pengawasan eksternal, pasal 12A ayat (2) disebutkan Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Komisis Yudisial berwenang :

- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan pedoman Perlaku Hakim;
- b. Memeriksa dan memutusdugaan pelanggaran atas Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim;
- c. Dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d;
- f. Meminta keterangan atau data kepada Mahkama Agung dan/atau pengadilan;
- g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau

- h. Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:

- a. Menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
- c. Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.⁷

Begitupun dengan halnya hakim Pengadilan Agama Pangkajene, untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang hakim maka hakim Pengadilan Agama Pangkajene tentunya berlandaskan pada aturan yang berlaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Atas beberapa uraian referensi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, untuk itu penulis mengangkat sebuah judul ***Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan sistem Pengawasannya di Pengadilan Agama Pangkajene.***

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatasan dan rumusan masalah. Hal ini sangat penting agar dalam pelaksanaan pengumpulan data dan analisis data tidak akan terjadi kekaburan dan

⁷Lihat UU No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, dan Pasal 12F

menyimpang dari tujuan semula. Adapun pokok masalah yang dimaksud adalah bagaimana penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan sistem pengawasannya di pengadilan agama pangkajene. Dari masalah tersebut selanjutnya dirincikan ke dalam sub masalah berikut :

1. Bagaimana penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene?
2. Bagaimana sistem pengawasan terhadap penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefenisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa istilah yang dianggap penting.

1. Pengawasan adalah memperhatikan, memeriksa, segala sesuatu yang sedang berlangsung dalam penyelidikan.⁸
2. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹
3. Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional," *Situs Resmi*. <http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/> (30 Desember 2011)

⁹Pasal 12D ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

4. Kode Etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim.¹¹
5. Pedoman Tingkah laku (*Code of Conduct*) Hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi Hakim yang menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.¹²

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut maka penulis menyimpulkan bagaimana seorang hakim menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta pengawasannya.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah meliputi penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan sistem pengawasannya di Pengadilan Agama Pangkajene.

D. Kajian Pustaka

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Tinjauan Yuridis tentang penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan sistem pengawasannya di pengadilan agama pangkajene. Mungkin sudah banyak literatur yang membahas tentang masalah ini, namun belum ada literatur yang membahas secara khusus

¹⁰ Ibid., h.3.

¹¹ Ibid., h.2.

¹² Ibid., h.1.

tentang judul skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih terfokus pada pokok kajian penulisan maka penulis telah menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung RI dalam buku, *Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct)* menjelaskan, mengenai bagaimana menjalankan sebuah sistem hukum khususnya dalam proses beracara di tingkat pengadilan. Buku ini memberikan gambaran yang jelas atau klasifikasi kepada pembaca tentang pelaksanaan pedoman perilaku dan Kode Etik Hakim.
2. Binsar Gultom dalam bukunya *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, memberikan gambaran tentang bagaimana seorang hakim dalam menjalankan profesinya, khususnya dalam menangani suatu perkara seorang hakim yang harus melihat jauh lebih dalam serta mempertimbangkan segala sesuatu dalam memutuskan suatu perkara. Buku ini telah mengakomodir tentang bagaimana seharusnya hakim dalam melihat atau menyelesaikan suatu perkara namun belum memberikan gambaran tentang bagaimana mengkombinasikan suatu alat bukti dengan alat bukti lain yang kelak akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara.
3. E. Sumaryono dalam bukunya *Etika Profesi Hukum*, mengkaji secara panjang lebar tentang sejumlah profesi hukum dan kode etik profesi hukum sebagai pedoman para professional hukum dalam berlaku dan bertindak berdasarkan profesinya.

4. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara dalam bukunya *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, memberikan gambaran mengenai seluk beluk permasalahan hukum di Indonesia. Dan menjelaskan tentang upaya penanggulangan serta memberikan masukan-masukan kepada aparat hukum agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum yang mulia.

Berdasarkan beberapa literatur yang disebutkan tersebut hingga tersusun karya tulis ini, belum ditemukan suatu literatur yang membahas seperti apa yang penulis paparkan dalam kajian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

A. Pengertian Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah sebuah rumusan tentang aturan-aturan etika dan pedoman tingkah laku/perilaku hakim yang harus dipegang teguh oleh setiap hakim, baik dalam kapasitasnya sebagai seorang pejabat Negara maupun posisinya sebagai anggota masyarakat.

Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku¹.

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Pedoman tingkah laku hakim ialah penjabaran dari Kode Etik Profesi Hakim yang menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam

¹<http://www.badilag.net>. Keputusan bersama Ketua MARI dan KYRI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Jakarta: 2011), h. 6.

pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.²

Tugas kadi adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang kadi harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai kadi. Kadi tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun. Ia harus tetap tegar dari segala hantaman dari pihak manapun.³

Dalam hubungan ini Allah dalam firmanNya pada surat al-An'am ayat 152:



Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran

²<http://www.pn-sarolangun.go.id>. MUNAS IKAHI. ke XIII, *Kode Etik Profesi Hakim* (Bandung: 2000), h.1.

³Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 32.

dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.⁴

Maksud ayat di atas bahwa apabila seorang hakim mengatakan sesuatu kepada pihak-pihak yang bersengketa, maka hendaklah berlaku adil, sekalipun diantara kedua pihak itu ada hubungan kerabat dengan dirinya.

Lebih lanjut dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 42, yang berbunyi:



Terjemahnya:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.⁵

Allah swt. Memperingatkan bahwa jika para hakim menghukum, maka hendaknya mereka menghukum dengan adil, karena sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.

⁴Kementrian Agama *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004), h.149.

⁵*Ibid.*, h. 115.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) *Berperilaku Adil*, (2) *Berperilaku jujur*, (3) *Berperilaku Arif dan Bijaksana*, (4) *Bersikap Mandiri*, (5) *Berintegritas Tinggi*, (6) *Bertanggung Jawab*, (7) *Menjunjung Tinggi Harga Diri*, (8) *Berdisiplin Tinggi*, (9) *Berperilaku Rendah Hati*, (10) *Bersikap Professional*.

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.⁶

Bersikap adil menjadi poin pertama dalam prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal ini memperlihatkan bahwa seorang hakim sebagai “wakil Tuhan” di muka bumi ini harus mampu bersikap adil terhadap perkara yang ditanganinya, tanpa memandang pihak yang berperkara. Memberikan putusan benar kepada yang benar dan menyatakan salah bagi yang salah. Setiap manusia harus memiliki sifat adil, namun khusus kepada hakim yang pada hakikatnya memang diangkat untuk menetapkan keadilan di muka bumi ini.

Dalam menjalankan tugas seorang hakim harus menjunjung tinggi keadilan. Hal tersebut bukanlah sebuah wacana belaka jika hakim dalam memutuskan perkara tetap memperhatikan asas-asas keadilan dalam proses

⁶ <http://www.badilag.net>, *Op.cit.*, h. 6.

persidangan. Diantaranya yaitu dihormatinya asas pradugaa tak bersalah (*presumption of innocence*), mendengarkan kedua belah pihak (*audio at alterampartem*), ketakberpihakan (*imparsialitas*) serta prinsip persamaan perlakuan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.⁷

Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela, memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari Advokat, Penuntut, Orang yang sedang diadili, Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilanannya.

⁷*Ibid.*, h. 8.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.⁸

Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang dibawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari: Advokat, Penuntut, Orang yang sedang diadili, Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

⁸*Ibid.*, h. 9.

Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.⁹

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan poin tersebut dijabarkan dalam tuntutan terhadap hakim untuk lebih bijaksana dalam menghadapi profesinya sebagai hakim. Misalnya Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. Larangan mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut. larangan mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses

⁹*Ibid.*, h. 10.

peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) hakim dan badan peradilan. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.¹¹

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan

¹⁰*Ibid.*, h. 13.

¹¹*Ibid.*, h. 13.

hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan tentang integritas dalam poin ini dapat dilihat dari beberapa contoh penerapan integritas hakim yang harus dilakukan diantaranya, Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Penerapan penggunaan predikat jabatan Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.¹²

Penggunaan informasi peradilan hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

¹²*Ibid.*, h. 16.

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.¹³

Sehubungan dengan hal tersebut, Imam Mohammad bin idris al-Shafi'i, dan beberapa ahli hukum dari kalangan Mazhab Hambali mempunyai pendapat yang berlawanan tentang keikutsertaan hakim dalam aktivitas perdagangan. Berkaitan dengan hal ini para ahli hukum tersebut berpendapat bahwa seorang hakim yang menjalankan aktivitasnya hukumnya adalah makruh. Oleh karena itu seorang hakim perlu melakukan aktivitas perdagangan untuk menghidupi keluarganya dia harus melakukannya melalui seorang agen.¹⁴

Umar ibnu al-Khattab r.a. sangat tegas dalam masalah keterlibatan hakim dalam aktivitas bisnis. Berkaitan dengan hal ini beliau pernah mengatakan: “(aktivitas) perdagangan dari seorang penguasa (termasuk hakim) adalah sebuah kerugian untuk rakyatnya”.¹⁵

Penerapan umum tentang hakim yang menjunjung tinggi harga diri yakni hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Penerapan aktifitas bisnis hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim, seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

¹³*Ibid.*, h. 17.

¹⁴Mohammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Umm* (Mesir: Al-Martaba'at al-Almairiyah, 1324 H), j. 6., h.201.

¹⁵*Ibid.*, h. 43.

Aktifitas lain, hakim dilarang menjadi Advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

Aktifitas masa pensiun, mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.¹⁶

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Poin terhadap penerapan berdisiplin tinggi, hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk,

¹⁶<http://www.badilag.net>, *loc. cit.*

harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.¹⁷

Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Berperilaku rendah hati dilakukan seorang hakim dalam pengabdian hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

Popularitas seorang hakim berjalan seimbang dengan kerendahan hati agar hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.¹⁸

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk

¹⁷*Ibid.*, h. 19.

¹⁸*Ibid.*, h. 20.

meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

B. Pembahasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan sebutan "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹

Sehubungan dengan hal ini, maka peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan itu adalah menafsirkan undang-undang secara aktual, dengan tetap beranjak dari landasan cita-cita bangsa yang bersifat umum (*common basic idea*) yang terdapat dalam falsafah bangsa, yaitu Pancasila dan tujuan peraturan

¹⁹Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 103.

perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, para hakim itu tidak reaktif terhadap pembaruan dan perkembangan tata kemaslahatan masyarakat.²⁰

Berdasarkan konstitusi Indonesia merdeka, peran hakim dan Pengadilan Agama ditetapkan pada posisi ganda, yaitu sebagai lembaga agama menurut pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dan posisi lembaga hukum dan ketatanegaraan menurut pasal 24 dan 25 UUD itu.

Dalam lembaga agama Islam, hakim dari pengadilan agama diposisikan komunitasnya sebagai contoh, teladan dan panutan menjadi gejala keseharian dan yang demikianlah yang melatarbelakangi mengapa komunitasnya memandang bahwa ia adalah pamimpinnya. Atas realitas ini, sehingga menurut Abd Gani Abdullah, S.H., Hakim Peradilan Agama adalah ulama di mata masyarakat.²¹

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur.

²⁰*Ibid.*, h. 184.

²¹Abdul Gani Abdullah, *Posisi Peradilan Agama dalam Undang-undang No. 35 tahun 1999*, Prospektif Hukum Masa Datang, (sebuah analisis Kinerja Hakim), dalam *10 tahun Undang-undang Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Ditbinbapera Islam, Fakultas Hukum UI dan Pusat Pengajian Hukum Islam Masyarakat, 1999), h. 114 .

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma–norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.

Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

C. Perumusan dan Penetapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman pelaksanaan tugas sebagai hakim

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain *The Bangalore Principles of Yudicial Conduct*. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104-A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku.²²

Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya

²² *Ibid.*, h.3.

terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32A juncto pasal 81B Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Beberapa pengertian dan perumusan tentang penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang tertera di atas merupakan referensi terhadap Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menetapkan dan memutuskan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai petunjuk pelaksanaan bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya menjabat sebagai seorang hakim.

Maka berdasarkan pertimbangan perumusan kedua lembaga yang disatukan untuk dijadikan sebagai keputusan bersama Mahkamah Agung NOMOR : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Komisi Yudisial NOMOR : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim.²³

Setiap Pimpinan Pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini.

Pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan factor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan maupun pihak lain.

²³<http://www.badilag.net>, *loc. cit*

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan/atau Komisi Yudisial RI, kemudian menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.

Penetapan terhadap kedua keputusan lembaga tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 april 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi yudisial oleh M. BUSYRO MUQODDAS, S.H., M.Hum. dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., MH.²⁴



²⁴Ibid., h. 21.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang dan Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Pangkajene

Sebagaimana diketahui bahwa Islam menganjarkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat sekaligus secara individual. Tata aturan dalam kehidupan sehari-hari harus dipatuhi oleh masyarakat dalam rangka menciptakan keselarasan dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu Islam telah memiliki aturan-aturan hukum yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Aspek ajaran Islam yang paling banyak membicarakan masalah hukum itu dikenal dengan aspek syari'ah, atau lebih teknis disebut dengan fikih Islam. Dan untuk hal ini, lebih dari satu abad yang salim mendapat posisi yang cukup istimewa dalam masyarakat intelektual Islam.¹

Di dalam Fikih Islam, masalah hukum perdata dan hukum pidana telah diatur. Aspek-aspek mengenai perkawinan, kewarisan, hibah, shadaqah, harta bersama dan lain-lain merupakan bidang bahasa dari hukum Perdata Islam. Sedangkan perkara-perkara mengenai perzinaan, pencurian, pembunuhan, dan perbuatan-perbuatan sejenis dapat digolongkan sebagai bidang penyelesaian hukum Pidana Islam.

¹J. N. D. Anderson, *Islamic Law in the Modern Word*, alih bahasa, Machnun, "Hukum Islam di Dunia Modern" (Surabaya: CV. Amarpress, 1991), h. 19.

Dalam konteks ini maka dapat dipahami bahwa sejak hukum Islam ini diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, dan beliau memperkenalkan kepada pengikut dan kaum muslimin pada saat itu secara otomatis ajaran hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Peradilan Agama ketika itu lebih berperan untuk menyelesaikan perkara-perkara masyarakat berdasarkan hukum Islam.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa yang bertindak sebagai hakim ketika itu adalah Rasul Allah dan juga sebagai muballigh. Dan di masa Rasulullah juga terjadi pembentukan Peradilan-Peradilan Agama di daerah luar Madinah. Sehingga beliau mengutus para sahabatnya untuk bertindak sebagai hakim dalam menyelesaikan sengketa-sengketa atau berbagai perkara yang dihadapi umat Islam dan membutuhkan penyelesaian yang adil.²

Dalam konteks seperti itu, maka bagi kaum muslimin meyakini bahwa penyelesaian perkara-perkara yang dihadapi harus dengan hukum Islam dimana dan kapanpun mereka berada. Selain itu diyakini pula bahwa Islam memiliki ajaran meliputi aspek kehidupan.

Di Indonesia, eksistensi Peradilan Agama sebagai wadah yang melaksanakan hukum-hukum Islam dalam bidang keperdataan dan pidana telah berperan sejak masa kerajaan-kerajaan Islam jaya di tanah air. kemudian kondisi ini berlangsung terus menerus hingga pada zaman penjajahan belanda, Peradilan Agama dibatasi wewenangnya.

²M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1994), h. 10.

Pada zaman Hindia Belanda pula, peradilan mulai kehilangan kekuasaannya, dalam arti bahwa setiap keputusan atas perkara-perkara yang menjadi kewenangannya harus mendapat pengukuhan dari Peradilan Umum.³ Kondisi seperti itu telah berlangsung hingga masa kemerdekaan, sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama di Indonesia pada awalnya dibagi dalam beberapa wilayah regional. Untuk wilayah pulau Jawa dan Madura, ditetapkan dengan Staatblad 1882 No. 152 dan 153 yang terdiri atas 7 pasal dan belum ada ketentuan kekuasaan Peradilan Agama.⁴

Peradilan Agama pada saat itu menjalankan tugas-tugasnya antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing yang dihadapi. Hal ini berlangsung hingga awal kemerdekaan, kecuali Peradilan Agama yang ada di Pulau Jawa dan Madura.⁵

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, maka Peradilan Agama di Indonesia mulai dibagi sesuai dengan wilayah-wilayah regional untuk menentukan kedudukan Pengadilan Tinggi Agama.

Untuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan tersebut, maka diaturlah pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, masing-masing:

- a. Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama di daerah Sumatera diantaranya daerah Aceh Pengadilan

³Bagir Manan, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 146.

⁴M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 10.

⁵Zaini Ahmad dan H. Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 58.

Agama Provinsinya di Banda Aceh, Sumatera Utara Pengadilan Agama Provinsinya di Medan, Sumatra Barat Pengadilan Agama Provinsinya di Padang, Sumatra Selatan Pengadilan Agama Provinsinya di Palembang.

- b. Penetapan Menteri Agama No 4 Tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama di daerah Kalimantan, dengan Pengadilan Agama Provinsi Banjarmasin.
- c. Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya dengan pengadilan Agama Provinsinya di Makassar.⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama telah mengalami perkembangan sejak dari kemerdekaan yakni sejak tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama No. 58 kemudian Penetapan Menteri Agama No. 4 dan 5 Tahun 1958.

Khusus Pengadilan Agama Pangkajene, sebenarnya telah ada sejak tahun 1915. Hanya Pengadilan Agama pada masa itu dinamai *qadhi*. Hal ini berarti bahwa sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Pengadilan Agama di daerah ini telah terbentuk.

Ketua Pengadilan Agama Pangkajene pada saat itu adalah Andi Calla Dg. Mabbate (sebagai *Qadhi* pertama) dengan Panitera (Juru Tulis) ialah Ambo Rappung Dg. Maloga. Sedangkan hakimnya (*Leden*) masing-masing adalah K.H. Muslimin, H. Muh. Said.

⁶M. Djamil Latif, *Op.cit.*, h. 32.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkajene ketika itu, meliputi *Onderafdeling* Pangkajene yang terdiri dari 5 *Adatgemenschap* yaitu Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Segeri, Mandalle dan Balocci. Sedangkan wilayah Kepulauan yang saat ini merupakan wilayah Kabupaten Pangkep, pada waktu itu berstatus sebagai *stadsgemeente* Makassar (Kota Madya Makassar sekarang).

Dari segi kuantitas atau jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pangkajene ketika itu, volume perkaranya setiap tahun rata-rata 100 jenis perkara yang pada umumnya terdiri dari cerai, talak, rujuk, kewarisan dan hibah. Dalam penyelesaian perkara tersebut Pengadilan Agama Pangkajene pada saat itu berkantor dibawah kolong rumah *Petta Qadhi* (Ketuanya) di tempat itu pula segala aktifitas Peradilan Agama selama bertahun-tahun di jalangkan. Dalam perkembangan selanjutnya tepatnya pada tahun 1943, H. Andi Hasan Dg. Pawawo diangkat sebagai *Qadhi* Ketua (*Petta Qadhi* yang kedua) menggantikan *Petta Qadhi* pertama (Andi Calla) dengan Paniteranya H. Kallasi Dg. Maloga serta *Ledennya* (Hakimnya) ialah H. Abd Rahman, H. Mas'ud dan H. Bahrudin.

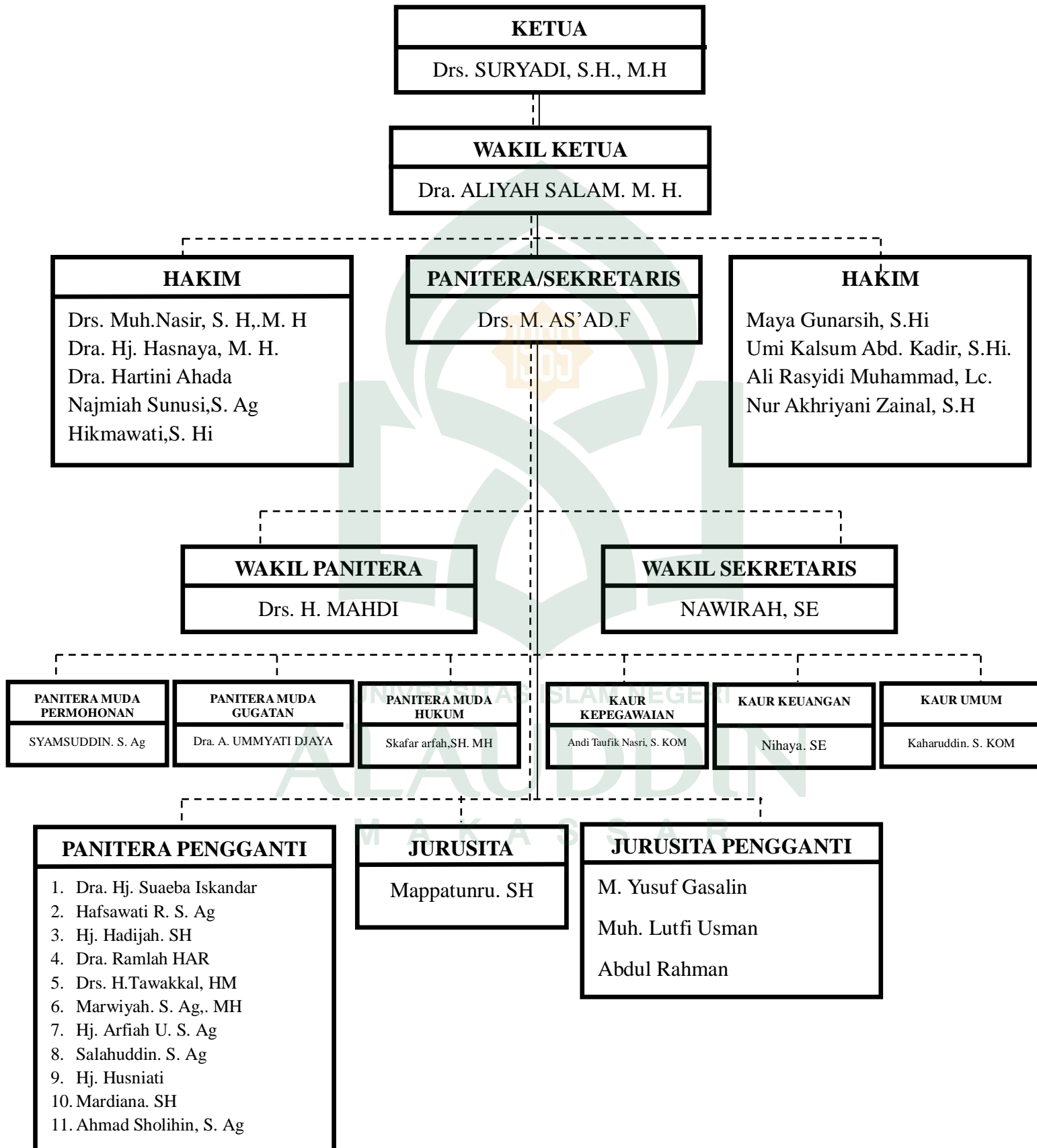
Wilayah yurisdiksinya tidak berubah masih tetap sama dimasa Andi Calla sebagai *Qadhi* dan Wilayah Kepulauan tetap berada dalam wilayah *stadsgemeente* Makassar.

Pada tahun 1953 adalah momentum berakhirnya kekuasaan di Pengadilan Agama Pangkajene, karena pada tahun tersebut terbentuklah Kantor Urusan Agama Kecamatan itu maka tugas-tugas *Qadhi* diambil alih oleh KUA Kecamatan. Dengan demikian praktis wewenang tidak ada lagi (*Qadhi* tidak berfungsi). Hal ini terbentuk sampai terbentuknya Mahkamah Syar'iyah.

Pada tahun 1958 berdasarkan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pangkep di Sulawesi pada waktu itu.

Untuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pangkep di Pangkajene yang terbentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 5 tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 tersebut, di Ketuai oleh K. H. Abd Hannan dengan Panitera Abd Karim dan H. Baharuddin, dengan Hakim-hakimnya: K. H. Syuaib Magga dan K. H. Burhanuddin dan dibantu oleh 7 orang Hakim Anggota Honorer masing-masing: H. Kallasi Dg. Maloga, H. Muh. Syarif, K. H. Muh. Said, Abu Bakaruddin, K. H. Muh. Arsyad dan Muh. Said.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pangkajene



3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkajene

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene Kab. Pangkep meliputi wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan luas wilayah 1.112,29 Km,⁷ terdiri dari 12 wilayah kecamatan dan 99 Kelurahan/Desa yakni:

1. Kecamatan Pangkajene, 9 Kelurahan/Desa
2. Kecamatan Minasate'ne, 8 Kelurahan/Desa
3. Kecamatan Bungoro, 8 Kelurahan/Desa
4. Kecamatan Labakkang, 13 Kelurahan/Desa
5. Kecamatan Ma'rang, 6 Kelurahan/Desa
6. Kecamatan Segeri, 5 Kelurahan/Desa
7. Kecamatan Mandalle, 5 Kelurahan/Desa
8. Kecamatan Balocci, 5 Kelurahan/Desa
9. Kecamatan Tondong Tallasa, 6 Kelurahan/Desa
10. Kecamatan Liukang Tupabbiring, 14 Kelurahan/Desa
11. Kecamatan Liukang Tangaya, 8 Kelurahan/Desa
12. Kecamatan Liukang Kalmas, 7 Kelurahan/Desa.⁸

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Hal penting yang harus dilakukan penelitian sebelum melakukan penelitian adalah obyek yang diteliti yang dikenal dengan populasi. Untuk

⁷Seksi Integrasi pengelolaan dan Data Deseminasi Statistik, *Kabupaten Pangkep dalam Angka 2007*, (BPS Kabupaten Pangkep, 2007), h. Xxvi.

⁸Sumber Data : Kantor Pengadilan Agama Pangkep, Tanggal 18 Agustus 1982.

mengetahui populasi penelitian dalam skripsi ini terlebih dahulu penulis memberikan beberapa pengertian populasi menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa:

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.⁹

- b. Nana Sudjana mengemukakan bahwa:

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung, ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kemampuan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.¹⁰

- c. Mardalis Mengemukakan bahwa “populasi adalah individu yang menjadi pengambilan sampel”.¹¹

- d. Ine I Anirma Yousda mengatakan bahwa “populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti baik berupa orang, benda, kejadian nilai maupun lain-lain yang terjadi”.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka populasi berarti keseluruhan objek penelitian yang memiliki objek paling sedikit atau sifatnya sama. Objek yang dimaksud adalah dijadikannya sebagai fokus penelitian untuk memperoleh data. Sehubungan dengan judul skripsi ini, maka penulis mengemukakan populasi dengan objek yang meliputi hakim Pengadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep.

⁹Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102.

¹⁰Nana Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung: Tarsito Sinar Baru, 1992), h. 6.

¹¹Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 93.

¹²*Ibid.*, h. 54.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut¹³ dan yang menjadi sampling disini yaitu Hakim Pengadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep. Sampel ini merupakan sampel jenuh karena jumlah sampel yang diteliti kurang dari 100 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang dari Hakim Pengadilan Agama Pangkajene Kab. Pangkep.

C. Metode penelitian

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud yang tercantum dalam metode ilmiah.¹⁴

Agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *field research* atau lapangan, yaitu meliputi fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian.

¹³Suharsimi Arikunto, *Op.cit.*, h. 104.

¹⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 46.

2. Jenis Pendekatan

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norma*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Dalam penelitian mengenai Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan sistem pengawasannya di Pengadilan Agama Pangkajene, penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.¹⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data terutama dalam prosedur pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau *judgemental sampling* (tidak semua populasi dijadikan sampel namun hanya sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan alasan kuat dapat memberikan data). Penentuan data yang berasal dari Pengadilan Agama Pangkajene menyangkut data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan pertama dalam penelitian ini. Data yang berasal dari beberapa ahli, penegak

¹⁵*Ibid.*, h. 3.

hukum dan para pihak dibutuhkan dalam rangka untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan nomor dua dalam penelitian ini. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kategorisasi berdasarkan data yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Penggunaan instrumen penelitian meliputi: observasi, kuisioner, wawancara dan studi dokumen...Sumardjono, 1989: 21

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan.

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. *Kualitatif* yaitu suatu jenis data yang mengategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang mendalam dan lebih bermakna. Keseluruhan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif dan diberikan penggambaran mengenai mekanisme penyelesaian kasus Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan sistem pengawasannya di Pengadilan Agama Pangkajene.

b. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas.¹⁶

Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, makalah dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan dapat memberi petunjuk dan inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian.¹⁷

- c. Bahan hukum tertier, yakni memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹⁸ seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *library research* (data kepustakaan) berarti membaca buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan, sedangkan *field research* (data lapangan) sebagai berikut:

1. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.¹⁹

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 141.

¹⁷*Ibid.*, h. 155.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.

2. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁰
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan).

d. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang harus di siapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
3. Alat perekam yang digunakan untuk merekam semua pembicaraan

e. Prosedur Penelitian

Kegiatan penelitian ini dimulai dengan menghimpun informasi mengenai Pelaksanaan serta Pengawasan tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene. Informasi tersebut digunakan sebagai panduan dalam penelitian selanjutnya.

²⁰Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Data Media, 1994), h. 44-45.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan data analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data skunder lalu disklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengorganisasi data, baik diperoleh dari data tertulis maupun dari hasil wawancara.
2. Proses data dengan cara memilah-milah data.
3. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang sebelumnya telah dikategorikan.

b. Analisis data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data ini dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan²¹ yang ada dalam skripsi ini, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat

²¹Ronny Hamitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 93.

menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene.
- b. Mengetahui sistem pengawasan terhadap penerapan kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di pengadilan agama pangkajene.

2. Kegunaan

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberi masukan terhadap perkembangan Hukum Acara Perdata khususnya Hukum Acara Peradilan Agama, yang berhubungan dengan “Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi pemikiran kepada:

- a. Aparat penegak hukum yang menjalankan fungsinya sebagai pengawas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, agar dapat menegakkan hukum dan keadilan bagi para hakim pengadilan, terlebih mengetahui pola pikir Hakim dalam menjalankan fungsinya.

- b. Aparat penegak hukum yang menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
- c. Hakim agar dapat mengetahui hal-hal yang menjadi kriteria dalam penilaian dalam pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- d. Pemerintah, agar dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para hakim melalui kebijakan penegakan hukum.

Disamping itu juga, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pengawasan, dalam rangka pengoptimalan hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum pada umumnya terutama Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada Khususnya.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai Pedoman Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene kabupaten Pangkep.

Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan pada norma atau tatanan hukum yang berada dalam masyarakat. Manakala manusia melakukan interaksinya tidak berjalan dalam kerangka norma yang ada, maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Begitu pula hal yang sama berlaku bagi yang namanya profesi, khususnya profesi hakim.

Salah satu unsur fundamental dalam sebuah Negara hukum (*rechtstaat*) adalah independensinya lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi¹, membutuhkan kebebasan dari segala bentuk pengaruh badan-badan dan pihak ekstrapudisial. Sebab begitu pentingnya lembaga ini untuk mengembang tugas dalam penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebebasan lembaga peradilan, kebebasan hakim sebagai ketentuan konstitusional yang kemudian digariskan dalam perundang-undangan organik².

Berjalan baik atau buruknya penegakan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada kinerja yang dilakukan oleh hakim itu sendiri. Sehingga berangkat dari hal tersebut untuk lebih mengefektifkan kinerja hakim maka

¹Pasal 24 ayat (2) UUD Perubahan Ketiga

²Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 251.

dirumuskanlah sebuah kode etik yang menjadi landasan serta pegangan bagi hakim untuk menjalankan profesinya.

Kode etik dan pedoman perilaku hakim secara umum dipahami sebagai suatu pedoman hakim dalam melaksanakan kerja-kerja hakim di lingkup peradilan agama pada khususnya dan pelaksanaan etika-etika hakim di luar pengadilan pada umumnya.

Pada Pengadilan Agama Pangkajene yang menjadi obyek penelitian penulis semua hakim diharapkan tunduk pada kode etik dan pedoman perilaku hakim baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan.

Menurut pasal 2 Kode Etik Profesi Hakim, disebutkan bahwa maksud dan tujuan kode etik hakim yaitu:

1. Sebagai alat :
 - a. Pembinaan dan pembentukan karakter Hakim
 - b. Pengawasan tingkah laku Hakim
2. Sebagai sarana :
 - a. Kontrol sosial
 - b. Pencegah campur tangan ekstra judicial
 - c. Pencegah timbulnya kesalah pahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat.
3. Memberikan jaminan peningkatan moralitas Hakim dan kemandirian fungsional bagi Hakim.
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.³

³www.google.com. MUNAS IKAHI. ke XIII, *Kode Etik Profesi Hakim*. Bandung: 2000.

Dalam konteks tersebut, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan perubahan yang terjadi di kalangan hakim, tidak jarang terjadi pemasalahan-permasalahan baru khususnya penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang mempunyai dasar hukum secara tegas dan jelas dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim ini sebagai hukum terapan di pengadilan agama. senada dengan hal itu, Suryadi sebagai seorang hakim mengatakan:

“kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah aturan yang telah dijalankan berdasarkan keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang mengutamakan kedisiplinan kerja hakim”.⁴

Hal tersebut dianggap penting karena bila tidak hati-hati dalam menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, dapat berimplikasi pada kesalahan menempatkan dan menjadikan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai dasar hakim dalam kehidupan keseharian di lingkup peradilan maupun di luar lingkup peradilan. Pada gilirannya akan mampu menempatkan etika semestinya yang telah ditetapkan, baik etika dengan sesama hakim, etika dengan pegawai pengadilan agama maupun kepada para pencari keadilan yang pada umumnya mampu melaporkan secara eksternal tingkah laku seorang hakim. Lebih lanjut dikatakan oleh ibu Alyah Salam bahwa:

“kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah prinsip dasar yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku yang akan dijalankan seorang hakim dalam kehidupan kedinasannya”.⁵

Prinsip dasar tersebut yang dimaksud adalah prinsip dasar yang disusun mahkamah agung dan komisi yudisial sebagai pegangan hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi mahkamah agung dan komisi yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Dalam kaitannya dengan kode etik

⁴Suryadi, Ketua Pengadilan Agama Pangkajene kabupaten Pangkep, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 19 Juli 2013.

⁵Alyah Salam, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 19 Juli 2013.

dan pedoman perilaku hakim di Pengadilan Agama Pangkajene, menurut ibu Nikmawati menjelaskan:

“Kode etik adalah bagaimana batasan-batasan perilaku hakim yang harus dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi (Kode Etik), sedangkan pedoman perilaku hakim adalah acuan dasar tingkah laku hakim”.⁶

Jadi kode etik dianggap penting buat seorang hakim dalam rangka menjaga kehormatannya, karena jika seorang hakim tidak menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut akan mendapatkan sanksi kode etik yang berlaku. Oleh karena itu setiap hakim harus menjaga segala tingkah laku dan menjaga kebersihan kepribadiannya dari perbuatan yang dapat menjatuhkannya sebagai hakim⁷. hal demikian dikatakan pula oleh bapak Ali Rasyidi Muhammad bahwa:

“kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah semacam batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim yang diatur oleh mahkamah agung untuk hakim bersikap, beretika, bermoral, sehingga hakim tetap terjaga kode etiknya”.⁸

Selanjutnya keterangan lain didapatkan dari bapak Ali Rasyidi Muhammad, beliau mengatakan:

“kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah suatu landasan seorang hakim dalam berperilaku sebagai seorang penegak hukum baik dalam lingkup peradilan maupun diluar lingkup peradilan”.⁹

Berkenaan dengan hal tersebut muncul idealis serta persepsi-persepsi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, dikalangan hakim majelis mengatakan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah landasan berperilaku seorang hakim, hasil keputusan bersama mahkamah agung dan komisi

⁶Hikmawati, Hakim Pengadilan Agama Pangkajene Kab. Pangkep, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 22 Juli 2013.

⁷Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 33.

⁸Ali Rasyidi Muhammad, Hakim Pengadilan Agama Pangkajene kabupaten Pangkep, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 23 Juli 2013.

⁹Dra Hartini Ahada, Hakim Pengadilan Agama Pangkajene kabupaten Pangkep, wawancara, oleh penulis di Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 23 Juli 2013.

yudisial sedangkan dari kedua hakim yang lain atau hakim anggota menjelaskan kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut sesuai apa yang ada dalam pikirannya yang landasannya tidak merujuk pada keputusan bersama mahkamah agung dan komisi yudisial.

B. Problematika Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai Pedoman Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene.

Pada dasarnya kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan sumber pedoman tingkah laku yang dapat dioptimalkan fungsinya secara efektif oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas pranatanya di lembaga pengadilan, namun sebagai seorang hakim yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf, bisa jadi sebagai seorang hakim pernah mengalami yang namanya problematika dalam menjalankan penerapan 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah menjadi panduan seorang hakim dalam berperilaku di lingkup pengadilan maupun di luar lingkup pengadilan.

Sebagai seorang hakim, khususnya bagi hakim di Pengadilan Agama Pangkajene paling tidak tanpa adanya keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang harus diterapkan tersebut harusnya hakim Pengadilan Agama Pangkajene terkhusus dan hakim pengadilan agama yang lain pada umumnya telah menanamkan nilai-nilai universal hukum Islam.

Dalam menjalankan penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim, problematika yang dihadapi oleh seorang hakim yakni:

1. Hakim Pengadilan Agama Pangkajene Kab. Pangkep belum memahami betul maksud dan cara penerapan yang tepat tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut.
2. Hakim Pengadilan Agama Pangkajene Kab. Pangkep belum menyadari betul administrasi lembaga yang seharusnya ditanamkan seorang hakim dalam menjalankan prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut.
3. Hakim Pengadilan Agama Pangkajene Kab. Pangkep belum menyadari bahwa dasar pijakan dalam beretika dan bertingkah laku telah ditetapkan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut diperkuat dengan beberapa pendapat dari para hakim di Pengadilan Agama Pangkajene, yang menjelaskan tentang problematika yang dihadapi seorang hakim dalam menjalankan profesinya. Seperti pendapat yang dikatakan oleh bapak Suryadi :

“kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai pedoman berperilaku seorang hakim tidak sedikit mengalami problematika dan tantangan yang dihadapi dalam proses penerapannya sebagai sumber patokan hakim”.¹⁰

Sehingga bukan suatu alasan untuk bersifat pesimis dalam menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai bagian tatanan hakim sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan putusan yang mencerminkan keadilan¹¹. Sebagai seorang hakim Alya Salam menjelaskan bahwa:

“kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam pelaksanaannya terkadang juga sebenarnya hakim masih belum memahami betul maksud dan cara penerapan yang tepat tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, karena ada diantara hakim muda yang tidak melakukan kode etik

¹⁰Suryadi, Ketua Pengadilan Agama Pangkajene kabupaten Pangkep, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 19 Juli 2013.

¹¹Cik Hasan Basri, MS., Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 194.

dan pedoman perilaku hakim pada tempatnya bagaimana etika hakim kepada atasannya dan bagaimana kepada yang lain”.¹²

Sebagai pengawas kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam internal Pengadilan Agama Pangkajene Alyah Salam merasa bahwa masih ada problematika dalam penerapan aturan tersebut. Hal itu disebabkan tidak adanya kesadaran administrasi lembaga yang ditanamkan seorang hakim khususnya hakim muda Pengadilan Agama Pangkajene.

Senada dengan hal itu menurut ibu Hikmawati yang mengatakan bahwa :

“Dalam menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim tidak ada problematika yang dialaminya tergantung dari indvidunya dan tidak ada intervensi”.¹³

Keterangan lain diperoleh dari penjelasan bapak Ali Rasyidi Muhammad bahwa:

“Ada problematika yang dialami yakni syarat godaan dalam pelaksanaannya seperti tidak bolehnya hakim menerima sogokan dari para pihak yang berperkara”.¹⁴

Selanjutnya ditegaskan pula oleh ibu Hartini Ahada:

“problematika yang dihadapinya hanya syarat godaan dalam menyelesaikan perkara yang mana seorang hakim harus berlaku adil terhadap perkara yang ditanganinya”.¹⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa problematika yang dialami seorang hakim ada sesuai individu seorang hakim dalam menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut.

¹²Alyah Salam, Wakil Ketua Pegadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 19 Juli 2013.

¹³Hikmawati, Hakim Pegadilan Agama Pangkajene Kab. Pangkep, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 22 Juli 2013.

¹⁴Ali Rasyidi Muhammad, Hakim Pegadilan Agama Pangkajene kabupaten Pangkep, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 23 Juli 2013.

¹⁵Hartini Ahada, Hakim Pegadilan Agama Pangkajene kabupaten Pangkep, wawancara, oleh penulis di Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 23 Juli 2013.

C. Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkajene.

Penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim dianggap sebagai sesuatu yang baik, karena etika dan tingkah laku hakim mempunyai kekuatan mengikat, terutama pelaksanaannya dalam lingkup pengadilan maupun di luar. Di samping itu secara yuridis dalam penerapannya dapat diterima oleh para pegawai pengadilan agama pangkajene dan secara psikologis oleh masyarakat karena ia lahir dari suatu perkara yang secara langsung terjadi dalam masyarakat. Itu artinya bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim lebih menyentuh masalah-masalah praktis dalam tatanan sosial kemasyarakatan.

Sebagaimana diketahui bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan salah satu dasar bagi hakim dalam bertingkah laku dilingkup pengadilan dan diluar lingkup pengadilan, pedoman tingkah laku (*code of conduct*) hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman bagi hakim indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.¹⁶

Tugas *qadhi* adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang *qadhi* harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai *qadhi*. *qadhi* tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun. Ia harus tetap tegar dari segala hantaman dari pihak manapun.¹⁷

¹⁶www.google.com. MUNAS IKAHI. ke XIII, *Kode Etik Profesi Hakim*. Bandung: 2000.

¹⁷Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 32.

Dalam hubungan ini Allah dalam firmanNya dalam surat al-An'am ayat 152 yang maksudnya bahwa apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu.

Dalam surat al-Maidah ayat 42 Allah swt. Memperingatkan bahwa jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil, karena sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) *Berperilaku Adil*, (2) *Berperilaku jujur*, (3) *Berperilaku Arif dan Bijaksana*, (4) *Bersikap Mandiri*, (5) *Berintegritas Tinggi*, (6) *Bertanggung Jawab*, (7) *Menjunjung Tinggi Harga Diri*, (8) *Berdisiplin Tinggi*, (9) *Berperilaku Rendah Hati*, (10) *Bersikap Professional*.¹⁸

Langkah penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim lebih ditekankan pada pemberdayaan hakim. Hal ini dilakukan, karena hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, sehingga tanpa hakim, pengadilan tidak layak sebagai lembaga peradilan. Bahkan dalam perkembangannya oleh sebagian masyarakat sering menghadapi hakim dalam menyelesaikan perkaranya. Artinya penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim identik dengan pengadilan itu sendiri.

Oleh karena itu hakim mempunyai eksistensi yang sangat eksistensial dalam sistem peradilan (Agama), maka dengan sendirinya fungsi hakim dalam pengadilan sangat fungsional. Artinya bahwa pelaksanaan fungsi hakim dalam pengadilan agama sangat menentukan citra pengadilan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa jika hakim dalam suatu lembaga peradilan tidak menerapkan

¹⁸www.google.com. Keputusan bersama Ketua MARI dan KYRI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Jakarta: 2011), h. 5.

kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka dapat dikatakan bahwa pengadilan itu mempunyai citra buruk. Sebaliknya jika hakim dalam suatu lembaga peradilan menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara maksimal dan optimal, maka hal itu menunjukkan citra baik bagi lembaga peradilan itu. Kaitannya dengan penetapan kode etik dan pedoman perilaku hakim di Pengadilan Agama Pangkajene kabupaten Pangkep, Suryadi sebagai seorang hakim menyatakan yakni:

“Para hakim diharuskan untuk menjadi hakim yang semestinya sebagaimana keputusan mahkamah agung dan komisi yudisial tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim”.¹⁹

Artinya bahwa hakim Pengadilan Agama Pangkajene kabupaten Pangkep dituntut kemampuannya untuk menjalankan dan menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana mestinya. Selanjutnya menurut pendapat ibu Alyah Salam, bahwa:

“Penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim terkhusus hakim muda pengadilan agama pangkajene masih banyak yang belum menerapkan kode etik tersebut, terlihat dari peroblematika yang dihadapinya dalam menjalankan tugas kedinasan, bagaimana beretika yang semestinya kepada atasan serta pegawai pengadilan dan bagaimana etika kepada para pencari keadilan yang semestinya yang diatur dalam keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.²⁰

Penjelasan mengenai penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim menurut Alyah Salam bahwa penerapannya yang semestinya sesuai aturan yang berlaku masih kurang sekali terkhusus kepada hakim-hakim muda Pengadilan Agama Pangkajene yang mana dalam penerapannya masih belum bisa membedakan bagaimana etika yang semestinya terhadap para pegawai di

¹⁹Suryadi, Ketua Pegadilan Agama Pangkajene kabupaten Pangkep, *wawancara* oleh penulis di Pegadilan Agama Pangkajene, tanggal 19 Juli 2013.

²⁰Alyah Salam, Wakil Ketua Pegadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 19 Juli 2013.

Pengadilan Agama terkhusus kepada atasan dan etika kepada para pihak dalam menyelesaikan perkara. Selanjutnya dikatakan pula oleh ibu Hikmawati bahwa:

“Penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim telah diterapkannya sebagaimana mestinya, karena hal tersebut menjadi kewajiban seorang hakim dalam beretika dan bertingkah laku yang semestinya dalam kehidupan seorang hakim”.²¹

Dengan demikian penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim harus berlandaskan pada aturan yang telah ada, sebagaimana didasarkan atas jawaban dari sepuluh (10) kuisioner yang telah dibagikan kepada para kalangan di lembaga pengadilan yang berkaitan tentang penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim terkhusus bagi hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang menjawab bahwa penerapan tentang hal tersebut telah diterapkan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

KATEGORI JAWABAN	JUMLAH	PRESENTASE
1. YA	10	100 %
2. TIDAK	-	0 %
Jumlah	10	100%

Sumber Para Responden

Data di atas menunjukkan bahwa 100% hakim Pengadilan Agama Pangkajene kabupaten Pangkep telah menerapkan 10 butir kode etik dan pedoman perilaku hakim yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari

²¹Hikmawati, Hakim Pengadilan Agama Pangkajene Kab. Pangkep, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 22 Juli 2013.

seorang hakim. Ini artinya bahwa hakim Pengadilan Agama Pangkajene telah menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Ali Rasyidi sebagai seorang hakim mengatakan:

“penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim telah diterapkan sebagaimana ketetapan mahkamah agung dan komisis yudisial, akan tetapi dalam hal penyelesaian perkara para pihak khususnya pihak yang merupakan hubungan keluarga biasa yang sulit diterapkan”.²²

Hal tersebut jelas bahwa penerapan kode etik dari 10 butir prinsip hakim hanya satu yang sulit dilakukan, yakni adil karena dalam penjelasan adil pada butir pertama tentang 10 prinsip yang harus diimplementasikan seorang hakim pada bagian mendengarkan kedua belah pihak.

“Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di lingkup gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak berperkara tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan”.²³

Lebih lanjut tentang langkah-langkah penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai sumber etika seorang hakim pengadilan agama pangkajene kabupaten pangkep, Hartini Ahada sebagai seorang hakim mengatakan:

“Dalam penerapan hal tersebut telah diterapkan sebagaimana mestinya, karena telah menjadi kewajiban seorang hakim menjalankan hal tersebut”.²⁴

Dengan demikian, hakim harus berani dan jeli dalam menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah diwajibkan kepada semua hakim

²²Ali Rasyidi Muhammad, Hakim Pegadilan Agama Pangkajene kabupaten Pangkep, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 23 Juli 2013.

²³*Ibid*, h. 8.

²⁴Hartini Ahada, Hakim Pegadilan Agama Pangkajene kabupaten Pangkep, wawancara, oleh penulis di Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 23 Juli 2013.

pengadilan dalam beretika dan berperilaku yang semestinya dalam lingkup pengadilan dan diluar lingkup pengadilan.

D. Sistem Pengawasan terhadap Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada Pengadilan Agama Pangkajene.

Kode etik dan pedoman perilaku hakim yang merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal, namun karena banyaknya lembaga pengadilan di Indonesia maka yang mengawasi secara internal dibebankan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat dalam kesehariannya.

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32a juncto pasal 81b undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung, maka disusunlah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) *Berperilaku Adil*, (2) *Berperilaku jujur*, (3) *Berperilaku Arif dan Bijaksana*, (4) *Bersikap Mandiri*, (5) *Berintegrasi Tinggi*, (6) *Bertanggung Jawab*, (7) *Menjunjung Tinggi Harga Diri*, (8) *Berdisiplin Tinggi*, (9) *Berperilaku Rendah Hati*, (10) *Bersikap Professional*.²⁵

Hal demikian, menurut Suryadi sebagai ketua pengadilan agama pangkajene yang mempunyai kewenangan secara khirarki dari mahkamah agung dan komisis yudisial mengatakan bahwa:

“Selama pengawasannya secara internal kelembagaan di pengadilan agama pangkajene terhadap penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim menjelaskan bahwa hal tersebut telah diterapkan oleh hakim-hakim pengadilan agama pangkajene”.²⁶

Lain halnya dengan Alyah Salam sebagai wakil ketua pengadilan agama pangkajene menjelaskan bahwa :

“Dalam pengasannya terhadap aturan tersebut sebagaimana telah dijelaskan dari problematika hakim bahwa masih banyak hakim muda yang belum melaksanakan kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan semestinya”.²⁷

²⁵Ibid., h. 5.

²⁶Suryadi, Ketua Pegadilan Agama Pangkajene kabupaten Pangkep, wawancara oleh penulis di Pegadilan Agama Pangkajene, tanggal 19 Juli 2013.

²⁷Alyah Salam, Wakil Ketua Pegadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 19 Juli 2013.

Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim pedoman tingkah laku (*code of conduct*) hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman bagi hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.²⁸

Berdasarkan pasal 12A undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menjelaskan bahwa pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain itu pengawasan sebagaimana dimaksud pada pengawasan internal untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Dengan demikian sistem pengawasan terhadap penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara internal dilakukan oleh ketua dan wakil ketua yang secara hierarki mempunyai kewenangan dalam pengawasan sehari-hari seorang hakim dalam menjalankan tugas dan di luar tugasnya sebagaimana aturan yang telah ditetapkan.

²⁸www.google.com. MUNAS IKAHI ke XIII, *Kode Etik Profesi Hakim* (Bandung: 2000), h.1.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai aturan main seorang hakim di Pengadilan Agama Pangkajene telah dijadikan sebagai pijakan (dasar) bagi hakim dalam beretika dan bertingkah laku baik dalam lingkup pengadilan maupun di luar lingkup pengadilan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.
2. Problematika yang dihadapi seorang hakim dalam menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim berbeda-beda sesuai individu hakimnya, tergantung bagaimana hakim mengingat bahwa dasar pijakan dalam beretika dan bertingkah laku telah ditetapkan sebagaimana mestinya.
3. Dalam rangka penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai aturan main seorang hakim di Pengadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep, harus ditempuh sesuai aturan yang ada yakni: (1) *Berperilaku Adil*, (2) *Berperilaku jujur*, (3) *Berperilaku Arif dan Bijaksana*, (4) *Bersikap*

Mandiri, (5) Berintegrasi Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Professional.

4. Pada umumnya pengawasan internal dan eksternal dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial namun karena banyaknya hakim dan lembaga Pengadilan Agama di Indonesia maka yang mengawasi keseharian hakim dalam penerapannya diberikan kewenangan kepada ketua dalam penerapan keseharian hakim terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim.

B. Implikasi Penelitian

Sebagai upaya penegasan, penerapan dan pengawasan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim maka diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan profesionalisme hakim, khususnya hakim Pengadilan Agama Pangkajene kabupaten Pangkep, agar menjadi hakim yang ideal sebagaimana yang diharapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
2. Diperlukan sosialisai kembali kepada hakim terhadap prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) *berperilaku adil*, (2) *berperilaku jujur*, (3) *berperilaku arif dan bijaksana*, (4) *bersikap mandiri*, (5) *berintegrasi tinggi*, (6) *bertanggung jawab*, (7) *menjunjung tinggi harga diri*, (8) *berdisiplin tinggi*, (9) *berperilaku rendah hati*, (10) *bersikap professional*.
3. Diperlukannya pengawasan ekstra terhadap penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim, karena bila pelimpahan pengawasan hanya kepada ketua pengadilan saja, penulis khawatir akan adanya hubungan emosional dan

rasa ketidaknakan dari para hakim membuat hasil pelaporannya kepada pihak pengawas di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yang nantinya berdampak terhadap laporan yang tidak sesuai fakta. Maka dalam hal ini diperlukan sebuah lembaga khusus yang mengawasi secara langsung hakim dalam kesehariannya menjalankan aturan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani *Posisi Peradilan Agama dalam Undang-undang No. 35 tahun 1999*, Prospektif Hukum Masa Datang, (sebuah analisis Kinerja Hakim), dalam *10 tahun Undang-undang Peradilan Agama*. Jakarta: Ditbinbapera Islam, Fakultas Hukum UI dan Pusat Pengajian Hukum Islam Masyarakat, 1999.
- Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Ahmad, Zaini dan Basit Adnan, H. Abdul. *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Ali, Muhammad. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1985.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Al-Shafi'i, Mohammad bin Idris. *Al-Umm*. Mesir: Al-Martaba'at al-Almairiyah, 1324 H.
- Anderson, J. N. D. *Islamic Law in the Modern Word*, alih bahasa, Machnun, "Hukum Islam di Dunia Modern". Surabaya: CV. Amarpress, 1991.
- Arikunto, Suharsimi *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995
- Arrasjid, Chainur *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1994.
- Basri, Cik Hasan, MS. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
- <http://www.badilag.net>. Keputusan bersama Ketua MARI dan KYRI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jakarta: 2011. Diambil pada Februari 2012
- <http://www.pn-sarolangun.go.id>. MUNAS IKAHI. ke XIII, Kode Etik Profesi Hakim. Bandung: 2000. Diambil pada Juli 2011
- Ibrahim, Johnny *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional," *Situs Resmi*. <http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/> 30 Desember 2011.
- Kementrian Agama *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004
- Latif, M. Djamil *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Mahfud MD, Moh. *Konstitusi dan Hukum dalam kontroversi Isu*. Jogjakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Manan, Bagir *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mardalis. *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*. Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Seksi Integrasi pengelolaan dan Data Deseminasi Statistik, *Kabupaten Pangkep dalam Angka 2007*. BPS Kabupaten Pangkep, 2007.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo. *Metodelogi Penelitin*. Jakarta: Data Media, 1994.
- Subagio, Joko *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sudjana, Nana. *Metode Statistik*. Bandung: Tarsito Sinar Baru, 1992.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum*. Jogjakarta : Kanisius, 1995.
- Sunggono, Bambang *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Surahman, Winarmo *Dasar-dasar Teknik Research*. Bandung: Tarsito, 1987.
- Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, dan Pasal 12F.
- Usman, Husaini *Metodologi Penelitian bidang social*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Quisioner

1. Apakah Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene berperilaku Adil;
Maksudnya Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saki-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advocat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan

(ya) (tidak)
2. Apakah Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene berperilaku jujur;
Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

(ya) (tidak)
3. Apakah Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene berperilaku jujur dan bijaksana;
Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

(ya) (tidak)
4. Apakah Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene bersikap mandiri;
Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

(ya) (tidak)
5. Apakah Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene berintegrasi tinggi;
Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

(ya) (tidak)

6. Apakah Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene bertanggung jawab; Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

(ya) (tidak)

7. Apakah Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene menjunjung tinggi harga diri; Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik didalam maupun di luar pengadilan.

(ya) (tidak)

8. Apakah Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene berdisiplin tinggi; Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

(ya) (tidak)

9. Apakah Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene berperilaku rendah hati; Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

(ya) (tidak)

10. Apakah Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene bersikap profesional; Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.

(ya) (tidak)

Penelitian ini hanya bersifat pengamatan, jadi bapak/ibu sekalian tidak perlu risau akan terjadi dampak-dampak ataupun efek-efek, partisipasi bapak-bapak sekalian dalam penelitian ini bersifat sukarela. Tidak akan terjadi efek samping sama sekali.

Demikian penjelasan dari saya. Atas partisipasi dan kesediaan waktu bapak-bapak , saya ucapkan terima kasih.

Pangkep, Juli 2013

Peneliti,

Peserta peneliti

(Hasanuddin Hasim)

(_____)



FORMAT WAWANCARA

1. Menurut Bpk/Ibu apakah yang di maksud dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ?
2. Problematika apa yg di dapatkan dalam menjalangkan Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai Pedoman Hakim PA Pangkajene ?
3. Apakah penerapan Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini telah dijalankan sesuai aturan ?
4. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Hasanuddin Hasim, lahir di pangkajene 01 November 1990, anak ke tiga dari Hasim dan Hafsawati. R S.Ag,. Alamat Jl H.M. Arsyad B BLOK K5 /13, RT 004 / RW 002, Kelurahan Pa'doang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep

Jenang pendidikan yang dilalui sekolah dasar (SD) 28 Tumampua II Kabupaten Pangkep tahun 1996-2002, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsanawiyah DDI AD Mangkoso Kab Barru tahun 2003-2006, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang Pangkep tahun 2007-2009, pada tahun 2009 penulis melanjutkan Sekolah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan diterima pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama dan menyelesaikan studi pada tahun 2013 tepatnya 30 Agustus 2013.

Pengalaman organisasi yang diikuti, selama menepuh pendidikan yaitu, Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya, Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Peradilan Agama periode 2010-2011, Pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Pangkep Koord. UIN Alauddin Makassar priode 2011-2012 dan menjabat Sekertaris Koord. Pada Priode 2012-2013, Anggota Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI).

Karya tulis Ilmiah dengan judul “Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Sistem Penawasannya di Pengadilan Agama Pangkajene” ini agar kiranya dapat bermanfaat bagi diri penulis pribadi dan berguna bagi setiap elemen yang membacanya, saran dan kritik dari pembaca merupakan selipan kesempurnaan bagi isi karya tulis ini, terima kasih.